

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk-Nya yang paling mulia di antara yang lain. Hal ini di tunjukkan dengan dimilikinya akal dan pikiran dalam setiap diri manusia.¹ Selain itu, manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial, dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain, tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa keterlibatan orang lain. Manusia juga membutuhkan aktivitas sosial antar sesama, hubungan sosial yang terjalin bisa terjadi pada sesama manusia yang sudah saling mengenal maupun baru pertama kali bertemu dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya.² Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus berusaha sebagaimana yang tersurat dalam Al-Qur'an.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى^{١٣٩}

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1

²<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/nucturenature/article/view/6123/5669>, diakses pada hari jum'at pukul 6:10 WIB.

Artinya : “Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”.(QS. An-Najm (53) ayat 39).³

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia harus berusaha untuk mendapatkan kebutuhannya, meskipun tidak dipungkiri bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah SWT. Namun Allah SWT tidak akan merubah nasib seseorang melainkan atas usaha dirinya sendiri. Setiap manusia haruslah menjemput rejeki mereka dengan jalan yang diperbolehkan bahkan dianjurkan oleh Allah SWT dengan keterlibatan orang lain di dalamnya.

Maka dari itu, dalam berhubungan dengan manusia lain haruslah memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam kebutuhan dengan orang lain inilah, antara yang satu dengan yang lain sering terjadi interaksi. Salah satu aktivitas interaksi yang dilakukan manusia adalah bermuamalah.

Pengertian *muamalah* secara umum dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasan dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa, kata *muamalah* dapat diartikan saling bertindak, saling berbuat, dan saling megamalkan. Sedangkan menurut istilah diketahui bahwa fiqh *muamalah* adalah aturan-aturan (Hukum) Allah SWT; yang ditunjukan untuk

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hlm. 84.

mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.⁴

Menurut pengertian ini, manusia, kapan pun dan dimanapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT; sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Pada awalnya dalam hal ber *muamalah* semua aktifitas itu hukumnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya, inilah kaidah ushul fiqh nya. Sama halnya pada salah satu aktifitas *muamalah* yang sering dilakukan yaitu jual beli. Secara bahasa jual beli berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuai yang lain, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang,⁵ atau uang dengan uang.

Berdasarkan definisi tersebut maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Jual beli merupakan bentuk *muamalah* yang menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli. Dalam syariat, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁶

Di tinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah dalam

⁴ Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 174.

⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 139.

(*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *sahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Namun dalam praktiknya, transaksi jual beli tidak semuanya berjalan sesuai dengan fungsi transaksi jual beli itu sendiri.

Realitanya masih ada beberapa pelaku usaha yang melakukan kegiatan transaksi jual beli tidak sebagaimana mestinya sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hal ini dapat disebabkan karena posisi konsumen yang berada pada posisi tawar yang lemah. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan konsumen. Pada umumnya para pelaku usaha berlindung dibalik *standart contract* atau perjanjian baku yang telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak (antara pelaku usaha dan konsumen), ataupun melalui berbagai informasi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.

Oleh karena itu, dalam rangka melindungi dan memberdayakan konsumen diperlukan adanya hukum yang jelas sehingga konsumen benar-benar dapat dilindungi dan diberdayakan. Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris – Amerika), atau *consument/consument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer*

itu adalah “(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang”.

Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus bahasa inggris-indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.⁷ Sebagaimana dikemukakan diatas, masyarakat umumnya telah menyebut tentang hukum konsumen, terutama sekali hukum perlindungan konsumen. Tetapi dalam tata hukum Indonesia, hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen tersebut belum terkenal.

Begitu pula dikalangan ahli hukum, bahkan tentang eksistensinya pun belum ada kesepakatan. Keadaan agak berubah setelah hadirnya UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 tahun 1999) pada tanggal 20 april 2000, itupun sekiranya pemerintah baru nanti tidak mengubah dan atau memberikan pengaturan lain. Hukum yang baik ialah hukum yang hidup dalam masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat, hukum dapat pula bertindak melindungi kepentingan konsumen.⁸

Hukum dalam masyarakat selalu berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya hukum bertujuan untuk menjamin penyesuaian kebebasan, dan kehendak

⁷ Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: CV. Triarga Utama, 2002), hlm.3.

⁸ <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999>, Diakses pada tanggal 28 Februari, pukul 9.33 WIB.

seseorang dengan orang lain sehingga tercapai keadilan. Disamping itu, hukum juga bertujuan melindungi pihak yang lemah dari yang kuat.⁹

Hukum yang baik ialah hukum yang hidup dalam masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat. Hukum dapat pula bertindak melindungi kepentingan konsumen. Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah di yakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis.

Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar- benar kuat. Di Indonesia sendiri mengenai perlindungan konsumen ini diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian Perlindungan konsumen yang teraktu dalam pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.¹⁰

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang “cukup baru” dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun “degungan” mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah dirancangkan sejak lama. Tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan “posisi” konsumen dalam

⁹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2001), hlm. 20.

¹⁰ Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 8.

tingkat terendah dalam menghadapi para pelaku usaha tidak adanya alternative yang dapat diambil atau dipilih oleh konsumen yang telah menjadi suatu hal yang umum dalam dunia usaha atau indutri di Indonesia. Ketidak berdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat bahkan mengaburkan hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha, sehingga ada kalanya konsumen seendiri tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dari atau pelaku usaha.

Dalam kajian Islam sendiri, kebenaran dan keakuratan informasi ketika seorang pelaku usaha mempromosikan dan menjual barang dagangannya menempati kajian yang sangat signifikan. Islam tidak mengenal istilah kapitalisme klasik yang berbunyi “*ceveat emptor*” atau “*late the buyer beware*” (Pembelilah yang harus hati-hati, melainkan dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan).¹¹ Kegiatan konsumen ini didasarkan pada transaksi atau akad, transaksi berasal dari bahasa inggris ‘transaction’ dan dalam bahasa arab sering disebut *Fiqh Al-Mu’amalat*.

Fiqh Al-Mu’amalat, dalam salah satu pengertiannya, mencakup bidang yang sangat luas, yaitu mencakup hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, djaminan, dan hukum lain-lain yang bertujuan mengatur

¹¹ Riza Laely Ikayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transakasi Elektronik”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014). Dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/14517/1/10380024_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf, diakses pada tanggal 15 November 2019, pada pukul 16.15 WIB.

hubungan-hubungan dengan sesama manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dalam Islam. Dilihat dari syarat dan rukun jual beli tersebut, dan para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila, jual beli itu terhindar dari cacat, seperti terhindar dari *gharar* yang mana kriteria barang yang diperjual-belikan tidak diketahuin baik jenis, kualitas serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

Dalam kegiatan berbisnis sendiri, tentunya sebagai umat muslim haruslah memiliki etika dalam berbisnis, yang mana tujuan utamanya adalah agar mendapat keridhoan Allah SWT. Bisnis harus dilakukan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian serta bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara penipuan, dan kebohongan hanya demi mendapat keuntungan, itu sudah jelas dilarang oleh Allah SWT. Maka dibutuhkan komunikasi yang jelas diantara pelaku usaha untuk mewujudkan bisnis yang sesuai syariat Islam.

Dengan berkembangnya zaman, manusia semakin sering membutuhkan komunikasi dalam skala yang lebih besar, karna tidak selamanya komunikasi itu harus dilakukan dengan cara tatap muka langsung, sehingga diperlukan komunikasi antar individu secara tidak langsung. Seiring dengan perkembangan teknologi, upaya untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan jasa telekomunikasi terlebih juga dengan makin terpacunya kemajuan teknologi internet. Semakin banyaknya pengguna

internet di Indonesia menyebabkan banyak pelaku usaha berpikir untuk menjadi penyelenggara jasa layanan internet.

Hal ini membuat pelaku usaha berlomba-lomba memberikan penawaran akses internet yang menarik serta murah, dari layanan paket harian maupun bulanan kepada konsumennya. Begitu pun masyarakat sebagai konsumen memberikan respon yang begitu besar akan adanya layanan internet tersebut. Salah satu penawaran yang disediakan adalah kartu perdana internet.

Kartu perdana internet ini merupakan sebuah kartu perdana yang sudah terdapat paket kuota internet di dalamnya dengan besar kuota dan masa berlaku berbeda-beda. Besar kuota biasanya memiliki hitungan GB (*gigabyte*) atau MB (*megabyte*), dimana 1 GB = 1000 MB. Sedangkan masa berlakunya bisa perbulan atau pertahun. Pada realitanya, untuk masa berlaku maupun masa aktifnya sendiri konsumen tidak dapat secara keseluruhan melainkan sebelum ditangan konsumen kartu tersebut sudah diaktifkan terlebih dahulu oleh para penjual.

Masa berlaku dari kartu tersebut terhitung sejak diaktifkannya kartu di tempat penjual, selebihnya konsumen hanya menggunakan masa berlaku yang tersisa karena masa berlakunya sudah terpotong sejak kartu perdana tersebut berada di *counter*. Dalam transaksi jual beli tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan terhadap masa berlaku kartu yang selama ini dijual di beberapa *counter*. Berkaitan dengan hal ini, dalam UU

No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi secara lengkap mengenai barang yang akan dibelinya.

Selain itu, dalam Islam sendiri, transaksi tersebut harus terhindar dari resiko atau *gharar* (penipuan). *Al-Gharar* merupakan suatu yang tidak diketahui pasti, benar atau tidaknya. Sedangkan *Bai'u Al-Gharar* adalah jual beli yang tidak pasti hasilnya karena tergantung pada hal yang akan datang atau kepada sesuatu yang belum diketahui, kadang-kadang terjadi, kadang-kadang tidak.¹²

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai penjualan kartu perdana internet aktifan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga pengkajian tersebut dirumuskan dalam sebuah penelitian yang berjudul “JUAL BELI KARTU PERDANA INTERNET AKTIFAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” (Studi Kasus Di Cipadung).

B. Rumusan Masalah

Seperti yang telah kita ketahui, masa berlaku maupun masa aktifnya kartu perdana tersebut konsumen tidak dapat secara keseluruhan melainkan sebelum ditangan konsumen kartu tersebut sudah diaktifkan

¹² Veithzal Rivai et., *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT Bu,I Aksara, 2011), hlm. 223.

terlebih dahulu oleh para penjual. Masa berlaku dari kartu tersebut terhitung sejak diaktifkannya kartu di tempat penjual, selebihnya konsumen hanya menggunakan masa berlaku yang tersisa karena masa berlakunya sudah terpotong sejak kartu perdana tersebut berada di *counter*. Maka, hal ini tidak sesuai dengan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi secara lengkap mengenai barang yang akan dibelinya. Selain itu, dalam Islam transaksi jual beli ini harus terhindar dari penipuan (*gharar*), yang mana akan merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual-beli kartu perdana internet aktifan di Cipadung?
2. Bagaimana jual-beli kartu perdana internet aktifan di Cipadung dalam perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana jual-beli kartu perdana internet aktifan di Cipadung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat dicapat solusi atas masalah yang dihadapi saat ini, dan dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang membutuhkan.

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme jual-beli kartu perdana internet aktifan di Cipadung.
2. Untuk mendeskripsikan jual-beli kartu perdana internet aktifan di Cipadung dalam perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mendeskripsikan jual-beli kartu perdana internet aktifan di Cipadung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat. Suatu penulisan setidaknya mampu memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat. Kegunaan penulisan ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penulisan ini, penulis berharap penulisan ini dapat memberikan manfaat.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pembelajaran kepada para pihak yang akan melakukan penelitian pada bidang hukum ekonomi syariah terkait (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Jual Beli Kartu Perdana Aktifan Di Cipadung).

- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan di bangku perkuliahan dan mengembangkan sekaligus membandingkan di lapangan secara langsung.
- c. Diharapkan memiliki nilai kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini, secara praktis diharapkan bisa memberikan manfaat bagi penulis guna menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi perlindungan konsumen bagi pengguna maupun pelaku usaha kartu internet aktifan.

a. Bagi Konsumen

Konsumen diharapkan lebih memahami mengenai hak-hak dan kewajiban dari dan terhadap pelaku usaha agar kedepannya bisa menjadi konsumen yang lebih cerdas dalam menghadapi permasalahan berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bagi Pelaku Usaha (Penjual dan Distributor)

Sebagai refleksi bagi para pelaku usaha baik penjual maupun distributor khususnya yang berperan dalam penjualan kartu perdana internet aktifan supaya dapat meningkatkan kualitas kegiatan bisnis yang mereka lakukan dengan lebih mempertimbangkan kejelasan informasi serta pelayanan yang mereka sampaikan agar tidak ada lagi konsumen yang merasa dirugikan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai data atas peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

E. Studi Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Idris Harahap yang berjudul “*Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara 2017.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual beli secara teoritis berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli kartu paket kuota internet (studi kasus di jalan Imam Bonjol) serta mengetahui hukum jual beli kartu paket kuota internet ditinjau dari perspektif Sayyid Sabiq. Persamaannya yaitu membahas mengenai bagaimana pelaksanaan jual beli kartu perdana internet aktifan. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu jika penelitian ini hanya berfokus pada perspektif Sayyid Sabiq, sedangkan peneliti berfokus pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹³ Muhammad Idris Harahap “ Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan)”, *Skripsi*, (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, 2017). Dalam <http://repository.uinsu.ac.id/2800/1/Muhammad%20Idris%20Harahap.pdf>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019, pukul 04.30.

Adapun Skripsi yang ditulis oleh Rahman Bagus Ramadhan, yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Prrovider Seluler Sebagai Konsumen atas Promo yang Dikeluarkan oleh Pelaku Usaha melalui Media Iklan di PT. Indonesia Satelite”*, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2015.¹⁴ Peneliti lebih memaparkan mengenai ketidakjelasan iklan yang dipromosikan oleh PT. Indosat yang terindikasi mengeluh masyarakat sebagai konsumen. Hak-hak konsumen yang telah melakukan aktivasi tidak diperoleh sesuai dengan iklan. Hal tersebut melanggar peraturan yang terkait dengan perlindungan terhadap konsumen khususnya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama berkaitan dengan ketidakjelasan informasi mengenai layanan operator dan juga menggunakan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaannya jika penelitian ini berfokus pada iklan yang dipromosikan, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada sisa masa berlaku yang dapat digunakan oleh konsumen dengan mengkaji dengan UUPK dan Hukum Ekonomi Syariah.

Skripsi yang ditulis oleh Laksamana Dian Ariawan yang berjudul *“Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Hak-Hak Pengguna Provider Seluler di Yogyakarta (studi kasus di Lembaga Konsumen*

¹⁴ Rahman Bagus Ramadhan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Provider Seluler sebagai Konsumen atas Promo yang dikeluarkan oleh Pelaku Usaha melalui Media Iklan di PT. Indonesia Satelite”, *Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2015). Dalam <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/RAHMAN%20BAGUS%20R%20-%20E1A009225.pdf>, diakses pada tanggal 15 November 2019, pukul 15.30.

Yogyakarta).¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat dalam mewujudkan perlindungan konsumen terhadap hak-hak pengguna *provider* selular. Persamaannya yaitu membahas mengenai hak-hak konsumen yang sesuai dengan hukum [perlindungan konsumen. Perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada peran Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat dalam mewujudkan perlindungan konsumen sedangkan penelitian penulis lebih kepada studi komparatif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah dengan penjualan kartu perdana Internet aktifan.

Skripsi yaitu yang ditulis oleh Wulan Indah Lestari yang berjudul “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Seluler Kartu Prabayar pada PT. TELKOMSEL Cabang Padang*”, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang 2008, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hak-hak dan kewajiban konsumen dan operator layanan seluler dalam penyelenggaraan telekomunikasi serta bagaimana perlindungan konsumennya berkaitan dengan hal tersebut. Persamaannya yaitu membahas hak-hak dan kewajiban konsumen yang berkaitan dengan layanan prabayar operator seluler. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu jika penelitian ini lebih mengacu pada perlindungan

¹⁵ Laksamana Dian Ariawan, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Hak-Hak Pengguna Provider Seluler di Yogyakarta (studi kasus di Lembaga Konsumen Yogyakarta)”, *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). Dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/17002/2/11340117_bab-i_iv-atau-v_daftar_pustaka.pdf diakses pada tanggal 20 Oktober 2019, pukul 16.36.

yang diberikan oleh YLKI Sumbar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan jasa layanan operator seluler sedangkan penelitian penulis lebih mengacu pada hak-hak yang diperoleh konsumen dalam jual beli kartu perdana internet aktifan dikaji dari segi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁶

Skripsi lainnya yang ditulis oleh Nur Khasanah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak- Hak Konsumen dalam Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan meneliti bagaimana pelaksanaan hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang disegel pada toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga yang ditinjau dari Hukum Islam beserta relevansinya berdasarkan hasil analisa penyusun apakah masih relevan jual beli buku disegel pada era masa kini. Persamaannya yaitu membahas mengenai hak-hak yang didapat oleh konsumen yang ditinjau dari hukum Islam. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu jika penelitian ini berfokus pada hak-hak konsumen jual beli buku disegel yang ditinjau dari hukum Islam saja, sedangkan penelitian penulis berfokus pada hak-hak yang diperoleh konsumen dalam jual beli kartu perdana internet

¹⁶ Wulan Indah Lestari yang, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Seluler Kartu Prabayar pada PT. TELKOMSEL Cabang Padang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang (2008) Dalam http://repo.unand.ac.id/2480/1/skripsi_cynthia.pdf, diakses pada tanggal 17 November 2019, pukul 16.50.

aktifan dikaji dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan dari segi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁷

F. Kerangka Berpikir

Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian adalah persetujuan, pemufakatan antara dua orang/ pihak untuk melaksanakan sesuatu. Jika diadakan tertulis juga dinamakan kontrak.¹⁸ Pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya menerapkan prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan pengeluaran seminimal mungkin.

Prinsip inilah yang kemudian mendorong para pelaku untuk melakukan tindakan merugikan konsumen, berkaitan dengan produk yang diedarkannya di dalam masyarakat.¹⁹ Jual beli dalam hukum perlindungan konsumen sendiri tidak dijelaskan secara langsung, melainkan sering di jelaskan sebagai pelaku usaha dan konsumen. Dalam sejarahnya, perlindungan konsumen pernah secara principal menganut asas *the privity of contract*. Oleh karena itu, pelaku usaha hanya dapat dimintakan

¹⁷ Nur Khasanah, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak- Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)”, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013). Dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/9321/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses pada tanggal 1 Maret 2020, pukul 17.42.

¹⁸ Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2005, hlm.89.

¹⁹ Nurhafni, Sanusi Bintang, “*Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, vol.20, no.3, (Banda Aceh, Desember 2018),h.475.

pertanggung jawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontaktual antara dirinya dan konsumen.

Maka, ada pandangan bahwa hukum perlindungan konsumen berkorelasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata.²⁰ Sesuai dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat aspek hukum yang mengaturnya seperti salah satunya yaitu hukum perdata. Pengertian konsumen dalam UUPK di atas lebih luas bila dibandingkan dengan 2 (dua) rancangan undang-undang perlindungan konsumen lainnya, yaitu pertama dalam Rancangan Undang- Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang menentukan bahwa:²¹

“Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.”

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu yang

²⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 13.

²¹ Yayasan Lembaga Konsumen, *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Yayasan Lembaga Konsumen, Jakarta, 1981, hlm. 2.

mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²² Kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan.

Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan atau mempergunakannya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.²³ Hak dan Kewajiban yang timbul dari hubungan hukum harus dilindungi oleh hukum, sehingga masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.²⁴

Sedangkan yang kedua dalam naskah final Rancangan Akademik Undang- Undang Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Rancangan Akademik). Disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen Perdagangan RI menentukan bahwa, konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.25.

²³ Abdul Halim, Barkaullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara Di Indonesia*, Naskah Publikasi Pasca Sarjana FH UII, Yogyakarta 2009, hlm.27.

²⁴ Desy, Dahlan, Rasyid, "Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik", *Law Journal*, vol. 1 (3), pp.33-51, (Banda Aceh, 2017), h.37.

dan tidak untuk diperdagangkan.²⁵ Istilah perjanjian berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata.

Yang dimaksud dengan jual beli adalah salah satu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata).²⁶ Perjanjian jual beli ialah sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Bahwa dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan penjual berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.

Adapun definisi lain yaitu, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan tujuan *iktisab*, yaitu upaya pemenuhan kebutuhan dengan cara pertukaran.²⁷ Sehingga unsur- unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah :

1. Adanya subjek huku, yaitu penjual dan pembeli;
2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga;

²⁵ Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan, *Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 1992, Pasal 1 a.

²⁶ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika:2008), hlm. 48.

²⁷ Mubarak, Jaih, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media:2017), hlm.4.

3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:²⁸

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Maksud dari beberapa hal diatas, agar jual beli tersebut terhindar dari adanya *gharar* (penipuan). Menurut Ibn Hazm al-Zhahiri yang menyatakan bahwa *gharar* merupakan keadaan ketika pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya atau penjualnya juga tidak tahu tentang kualitas/kuantitas objek yang dijualnya.²⁹ Islam sebagai agama dengan visi keadilan menolak secara tegas praktik jual beli *gharar*.

Jual beli *gharar* ini terlarang, dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi: ³⁰

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

²⁸ Subkti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang...*, hlm. 339.

²⁹ Mubarak, Jaih. *Fikih Mu’amalah Maliyah Prinsip-prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 199.

³⁰ <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>. Diakses pada tanggal 20 agustus2020 pukul 2:49 WIB.

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”(HR. Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab: Buthlaan).

Selain merugikan pihak yang terlibat secara langsung, kehadirannya juga akan membuat masyarakat gelisah. Secara tidak langsung jual beli *gharar* akan mengakibatkan perekonomian suatu negara sulit berkembang. Nabi Muhammad SAW dalam upaya memberantas praktik jual beli *gharar*, memberi peringatan kepada umatnya supaya menghindarinya. Dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil, padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Artinya : “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Al-Baqarah/2:188).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa'/4:29).

Jual beli *gharar* terjadi karena ketidakpastian dalam pertukaran. Hal ini bertentangan dengan karakter kontrak pertukaran. Menurut Adiwarman A. Karim, karakter kontrak pertukaran adalah memberikan kepastian baik dari segi jumlah maupun waktu. Jika di dalamnya mengandung aksi spekulasi, suatu pertukaran akan menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu untung, rugi atau tidak untung dan tidak rugi (impas). Ketidakpastian yang timbul dari aksi spekulasi dalam suatu pertukaran inilah yang disebut sebagai *taghrir* (*gharar*) dan dilarang dalam Islam.³¹

Para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli *gharar* tidak sah menurut syara'. Misalnya jual beli susu yang masih dalam kantong kelenjar, bulu yang berada di punggung binatang, mutiara yang masih dalam rumah kerang,

³¹Karim, Adiwarman A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:RajaGrafindo, 2009), hlm. 80.

binatang yang masih dalam kandungan, ikan yang berada dalam air, burung di udara yang belum ditangkap dan jual beli barang milik orang lain yang belum dimiliki. Jual beli itu tidak sah menurut syara' karena mengandung risiko dan ketidakpastian baik dalam hal jumlah maupun waktu. Praktik *gharar* adalah hal yang dilarang, namun bukan larangan untuk menghadapi risiko. Islam tidak menganjurkan seseorang untuk menghindari suatu risiko.

Bahkan, berurusan dengan risiko dalam perdagangan diakui dan didukung oleh Islam, karena risiko yang ada ditanggung bersama secara adil. Dengan kata lain, *gharar* mengacu pada transaksi yang belum jelas, yaitu transaksi yang dikondisikan pada situasi dan kondisi yang belum pasti.³²

G. Langkah-langkah Penelitian

Guna memperlancar dan mempermudah penulisan yang sistematis, maka penulisan mengambil langkah-langkah penulisan sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif-Kualitatif. Metode ini memberikan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual, akurat mengenai

³² <https://journal.iainkudus.ac.id/ondex.php/equilibrium/article/download/1277/pdf>. diakses pada tanggal 20 agustus 2020, pukul 4:44 WIB.

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³³

Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan jual beli kartu perdana internet aktifan yang terjadi di daerah Cipadung dan bagaimana menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen- dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penulisan tersebut, meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu ada yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, data dari penulisan ini diperoleh langsung dari pemilik konter itu sendiri dengan konsumen, yaitu melalui wawancara langsung dengan pemilik *counter* ataupun karyawan *counter* yang terletak di daerah Cipadung, diantaranya Seven Cell, San Komunika, Cintamu Cell, M. Cell, Dimas Cell.

b. Sumber Data Sekunder

³³ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 54.

Sumber data sekunder, adalah data yang sudah dalam bentuk jadi. Sumber sekunder yang digunakan oleh penulis adalah berupa buku, tulisan, atau karangan dari pengarang lain yang mempunyai kaitannya dengan penulisan ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.³⁴ Dalam menganalisis data yang bersifat kualitatif diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : (1) proses satuan (*uniting*), (2) kategorisasi, (3) penafsiran.³⁵ Dengan menggunakan data kualitatif peneliti dapat menafsirkan suatu masalah yang akan dibahas, dimana hal tersebut berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu jual beli kartu perdana internet aktifan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus di Cipadung).

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang benar dalam penulisan, pelaksanaan penulisan dilakukan dengan cara atau teknik yang relevan dengan data yang diperoleh. Secara garis besar dan

³⁴ Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak, 2018), hlm, 8.

³⁵ Meleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Bandung, 2008. Hlm. 190.

diperoleh dari sumbernya merupakan data primer, sedangkan data sekunder dari studi kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan, masalah dan hipotesis penelitian.³⁶ Dalam wawancara ini akan diperoleh data dari sumber pertama, dalam hal ini adalah beberapa pemilik konter di sekitar jalan Cipadung. Wawancara ini bertujuan untuk menggali data tentang segala hal yang berkaitan dengan penerapan layanan berbasis teknologi yang dapat dijadikan narasumber. Prose wawancara ini dilakukan secara langsung dengan beberapa pemilik *counter* ataupun karyawan *counter* yang terletak di daerah Cipadung, diantaranya Seven Cell, San Komunika, Cintamu Cell, M. Cell, Dimas Cell, dan beberapa konsumennya.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen

³⁶ MoH Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 62.

yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dari dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.³⁷

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dalam hal ini dilakukan dengan melakukan penulisan terhadap literatur yang memiliki kaitan dengan penulisan ini. Literatur ini berupa buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema penulisan ini.

5. Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulannya. Dalam pelaksanaannya, penganalisaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

³⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika), hlm. 143.

- a. Inventarisir data, yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumberm baik sumber primer maupun sekunder;
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokkan seluruh data ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d. Menarik kesimpulan.³⁸



³⁸ Muhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif lapangan dan Perpustakaan* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hlm. 113.